



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN WARGA BINAAN PADA LAPAS KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH

Annisa Qinaya Ramadhina¹, Hasbullah Malau²

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang^{1,2}

*Email Corresponding: [*anisakinavarahmadina@gmail.com](mailto:anisakinavarahmadina@gmail.com)¹, hasbullahmalau@fis.unp.ac.id²

ARTICLE INFORMATION

Article history:
Received date: 13 September 2025
Revised date: 10 Oktober 2025
Accepted date: 24 Oktober 2025

ABSTRACT

This research explores the challenges encountered in implementing inmate development programs at Class IIB Correctional Facility in Tanjung Pati, Payakumbuh. The study aims to identify and analyze the key constraints that hinder the effectiveness of correctional programs designed to rehabilitate inmates through personality and vocational development. Utilizing a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, and documentation involving correctional officers and inmates as primary sources. Findings indicate that the primary challenges include limited human resources, inadequate infrastructure, lack of access to educational materials, minimal stakeholder involvement, and market constraints for products created through vocational training. These obstacles significantly affect the consistency and quality of rehabilitation efforts, leading to a gap between program design and actual implementation. The study highlights the need for strategic improvements in resource allocation, program supervision, and community partnership to optimize the role of correctional institutions in preparing inmates for reintegration into society.

Keyword: Correctional program; Inmate development; Prison rehabilitation; Program implementation; Vocational training.

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengeksplorasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program pengembangan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala utama yang menghambat efektivitas program pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan yang dirancang untuk membina warga binaan melalui pengembangan kepribadian dan kemandirian. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan petugas pemasyarakatan dan warga binaan sebagai sumber utama. Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya akses terhadap materi pendidikan, minimnya keterlibatan pemangku kepentingan, dan kendala pemasaran untuk produk yang dihasilkan melalui pelatihan kemandirian. Kendala-kendala ini secara signifikan mempengaruhi konsistensi dan kualitas upaya membina, yang menyebabkan kesenjangan antara desain program dan implementasi aktual. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan strategis dalam alokasi sumber daya, supervisi program, dan kemitraan masyarakat untuk mengoptimalkan peran lembaga pemasyarakatan dalam mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi ke masyarakat.

Kata Kunci: Program pemasyarakatan; Pengembangan warga binaan; Pembinaan penjara; Implementasi program; Pelatihan kejuruan.

PENDAHULUAN

Masalah pembinaan warga binaan menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun program pembinaan telah menjadi bagian integral dari tujuan pemidanaan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program sering kali tidak berjalan optimal. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya dituntut untuk membina warga binaan secara kepribadian dan kemandirian, tetapi juga harus mampu menghadapi kendala-kendala yang kompleks seperti keterbatasan sarana, sumber daya manusia, prasarana, hingga rendahnya partisipasi warga binaan (Pakpahan & Habibie, 2025). Di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, Kota Payakumbuh, kendala tersebut menjadi sorotan tersendiri dalam proses pelaksanaan program pembinaan yang telah dirancang.

Berdasarkan wawancara lapangan, pelaksanaan program pembinaan di Lapas Tanjung Pati terbagi menjadi dua kategori utama: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian mencakup pendidikan, keagamaan, program kesetaraan (seperti paket A, B, dan C), dan asimilasi sidang TPP sedangkan pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan seperti barbershop, barista, bakery, las listrik, mebel, perkebunan, kerajinan tangan, dan randai. Namun, berbagai kendala ditemukan, antara lain kurangnya pemasaran hasil karya warga binaan, keterbatasan sarana pelatihan, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan dari mitra eksternal.

Tabel 1. Data Jumlah Warga Binaan dan Pelaksanaan Program Pembinaan

No	Jenis Data	Keterangan
1	Kapasitas Ideal Lapas	86 orang
2	Jumlah warga binaan (per Juli 2025)	283 orang (188 narapidana, 95 tahanan)
3	Jenis Program Pembinaan Kepribadian	Pendidikan, keagamaan, sekolah paket A–C, kepramukaan, dan asimilasi sidang TPP

4	Jenis Program Pembinaan Kemandirian	<i>Barbershop, barista, bakery, las listrik, mebel, kerajinan tangan, Perkebunan, dan randai</i>
5	Jumlah Petugas Pembinaan	12 orang (7kepribadian, 5 kemandirian)
6	Kendala Utama Program Kepribadian	Kurangnya tenaga pengajar dan sarana belajar
7	Kendala Utama Program Kemandirian	Pemasaran produk terbatas, kalah saing di pasar lokal
8	Sumber Dana Program	APBN, mitra kerja, dan dana swadaya warga binaan

(Sumber: Lapas Kelas IIB Tanjung Pati di Kota Payakumbuh)

Beberapa studi terbaru memperkuat urgensi topik ini. Penelitian oleh (Samsu & Yasin, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas program pembinaan warga binaan sangat dipengaruhi oleh kualitas instruktur, fasilitas, serta kemitraan antara Lapas dan lembaga lain. Sementara itu, (Arifa, 2024) menekankan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan pasca bebas sangat bergantung pada seberapa baik program pembinaan mampu membekali warga binaan dengan keahlian praktis dan nilai-nilai kehidupan yang konstruktif. Namun, studi-studi tersebut masih banyak berfokus pada keberhasilan program dan belum banyak menggali akar persoalan atau kendala konkret yang dihadapi dalam pelaksanaannya secara komprehensif di lapangan, khususnya pada Lapas Kelas IIB Tanjung Pati di Kota Payakumbuh.

Keterbatasan studi sebelumnya dapat dilihat dari belum tergambaranya kendala operasional yang bersifat lokal maupun struktural dalam sistem pembinaan warga binaan. Misalnya, bagaimana Lapas di wilayah non-metropolitan seperti Payakumbuh berjuang menjalankan program di tengah keterbatasan SDM, minimnya keterlibatan masyarakat, serta tantangan distribusi produk hasil

karya binaan (Heliany & Manurung, 2019). Belum banyak penelitian yang melakukan pendekatan kualitatif lapangan untuk mengungkap secara rinci bagaimana warga binaan, petugas pembinaan, dan mitra kerja eksternal merespons serta menghadapi berbagai kendala tersebut.

Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara kajian teoritis ideal mengenai sistem pemasyarakatan dan realitas empiris pelaksanaan program pembinaan di tingkat lapas kelas IIB. Kesenjangan ini mencakup aspek manajerial, infrastruktur, hingga sosiokultural yang berkontribusi terhadap tidak maksimalnya program pembinaan (Bachtiar, 2020). Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Sumatera Barat, merupakan representasi dari tantangan tersebut dan menjadi lokasi yang relevan untuk menggali data langsung dari pelaksana dan peserta program pembinaan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian warga binaan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus eksploratif terhadap tantangan pelaksanaan program secara lokal dengan pendekatan empiris yang mendalam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi penguatan sistem pembinaan warga binaan secara nasional.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Pati di Kota Payakumbuh. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali realitas sosial, perspektif subyektif para petugas lapas, serta pengalaman langsung para warga binaan selama mengikuti program pembinaan (Murdiyanto, 2020). Subjek dalam penelitian ini meliputi petugas pembinaan, pejabat struktural lapas, serta warga binaan yang aktif mengikuti program pembinaan

baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian (S. Sugiono, 2021). Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yakni dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pembinaan dan pemahaman terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam di lingkungan lapas, serta dokumentasi dari laporan kegiatan dan program yang dijalankan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dilengkapi dengan pedoman wawancara terbuka yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian (Hartono, 2018). Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul di lapangan (Abdul Mukhyi, 2023). Proses analisis ini mengacu pada kerangka berpikir William N. Dun, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran utuh mengenai berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pada Lapas Kelas IIB Tanjung Pati di Kota Payakumbuh.

HASIL DAN DISKUSI

Kendala Program Pembinaan Kepribadian

Salah satu kendala utama dalam pembinaan kepribadian adalah keterbatasan sarana dan prasarana keagamaan. Mushalla yang tersedia berukuran kecil dan tidak mampu menampung seluruh warga binaan secara bersamaan, sehingga sebagian di antaranya tidak dapat mengikuti kegiatan ibadah dengan optimal. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas program, karena tujuan utama pembinaan berupa peningkatan kesadaran religius dan moral tidak tercapai secara merata. Penelitian Situmorang (2020) juga menegaskan bahwa lemahnya fasilitas ibadah di lembaga pemasyarakatan berdampak pada inkonsistensi partisipasi warga binaan dalam kegiatan kerohanian, sehingga kesadaran spiritual yang diharapkan tidak berkembang secara signifikan.

Kendala lain muncul dari keterbatasan tenaga pembina profesional. Kegiatan pembinaan

kerohanian lebih banyak berlangsung ketika ada kunjungan dari instansi luar, seperti Kementerian Agama atau lembaga keagamaan, sementara tenaga pembina internal sangat terbatas. Hal ini mengurangi efisiensi pelaksanaan program karena keterlibatan sumber daya manusia tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang membutuhkan pendampingan. Berdasarkan teori Dunn (2018), efisiensi menuntut adanya keseimbangan antara input dan output, tetapi kondisi di Lapas Tanjung Pati menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Penelitian Syahrial (2021) juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa ketiadaan pembina tetap membuat kesinambungan pembinaan spiritual sulit terjaga dalam jangka panjang.

Selain faktor eksternal, motivasi dan partisipasi warga binaan dalam kegiatan kepribadian juga sering kali fluktuatif. Tidak semua warga binaan memiliki semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan keagamaan, seperti ibadah rutin, sehingga produktivitas program menurun. Keikutsertaan yang rendah ini menyebabkan hasil pembinaan tidak berkesinambungan, karena tidak tercermin dalam perubahan perilaku yang konsisten. Menurut penelitian Lestari (2022), aspek psikologis dan kondisi emosional warga binaan berperan besar dalam menentukan keberhasilan pembinaan moral, dan ketidakstabilan motivasi menjadi salah satu penghambat utama. Situasi ini semakin sulit diatasi karena pendekatan personal oleh pembina masih minim, sehingga individu dengan masalah motivasi tidak mendapat perhatian khusus.

Kendala pembinaan kepribadian juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta tenaga instruktur. Dana operasional yang terbatas membuat pengadaan sarana pelatihan, alat praktik, serta honorarium pembimbing dari luar tidak dapat dipenuhi dengan baik. Akibatnya, program pelatihan keterampilan hanya berjalan sesekali, bersifat jangka pendek, atau bahkan terhenti sama sekali karena keterbatasan biaya. Masalah serupa juga terjadi dalam kegiatan kemandirian seperti kepramukaan dan pertukangan, yang hanya bisa dilaksanakan jika ada relawan dari luar yang bersedia membantu. Ketergantungan terhadap pihak eksternal ini membuat program bersifat fluktuatif dan tidak

memiliki kesinambungan, sehingga tujuan jangka panjang berupa transformasi karakter dan kepribadian warga binaan tidak sepenuhnya tercapai. Tantangan berikutnya adalah kondisi overkapasitas Lapas yang membuat pengelolaan program pembinaan semakin kompleks. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan ruang kegiatan terbatas, sehingga pembinaan tidak bisa menjangkau semua orang secara merata. Selain itu, pengawasan terhadap jalannya program juga menjadi kurang maksimal, sehingga efektivitas serta produktivitas kegiatan menurun. Minimnya fasilitas pendukung, seperti bahan praktik atau peralatan kerja, juga turut memperburuk situasi. Misalnya, dalam pelatihan pertukangan, keterbatasan kayu dan peralatan menghambat warga binaan untuk berlatih secara optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas output, karena hasil keterampilan yang diperoleh tidak sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan.

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi faktor penghambat pembinaan kepribadian. Idealnya, kegiatan pembinaan melibatkan sinergi antara Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan lembaga sosial lainnya agar program dapat berjalan komprehensif dan berkelanjutan. Namun, di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, koordinasi lintas lembaga masih lemah, sehingga program pembinaan sering kali tidak berkesinambungan. Ketidaksinergisan ini membuat warga binaan tidak mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh, baik dari segi spiritual, psikologis, maupun keterampilan sosial, sehingga tujuan pembinaan untuk mencetak individu yang siap direintegrasikan ke masyarakat menjadi belum optimal.

Kendala Program Pembinaan Kemandirian

Pada aspek pembinaan kemandirian, kendala yang paling menonjol adalah keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung kegiatan keterampilan. Program-program seperti pertanian, kerajinan tangan, serta pelatihan keterampilan kerja (misalnya menjahit, pengelasan, dan pertukangan) hanya dapat dijalankan secara terbatas karena minimnya peralatan produksi, bahan baku, serta ruang praktik yang memadai. Misalnya, pada kegiatan pertanian,

lahan yang digunakan sangat sempit dan tidak semua warga binaan dapat dilibatkan karena keterbatasan area serta alat seperti cangkul, selang air, dan bibit tanaman yang jumlahnya terbatas. Begitu pula pada program kerajinan tangan, keterbatasan bahan seperti rotan, kayu, serta alat-alat pemotong menyebabkan hasil produksi tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan keterampilan kerja seperti menjahit dan las besi sering kali terhenti karena peralatan rusak dan tidak tersedia suku cadang pengganti, sementara penganggaran untuk pemeliharaan alat masih sangat minim. Akibatnya, sebagian warga binaan hanya terlibat secara bergiliran dan tidak memperoleh waktu latihan yang cukup untuk menguasai keterampilan secara optimal. Hal ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pembinaan, sebagaimana diukur melalui indikator efektivitas dan efisiensi dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018).

Dari perspektif efektivitas, program belum sepenuhnya mencapai tujuan peningkatan kemandirian warga binaan karena keterampilan yang diperoleh belum dapat dimanfaatkan secara maksimal setelah bebas. Dari sisi efisiensi, penggunaan sumber daya (sarana, tenaga pelatih, serta bahan baku) belum memberikan hasil yang sepadan dengan output yang diharapkan. Secara produktivitas, jumlah warga binaan yang mampu menghasilkan produk atau memiliki keterampilan siap pakai masih rendah dibandingkan dengan total peserta pembinaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan penganggaran dan koordinasi antarinstansi, misalnya antara Lapas dengan Dinas Ketenagakerjaan atau Balai Latihan Kerja (BLK) setempat. Dukungan lintas sektor yang belum optimal menyebabkan kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati masih bersifat insidental dan belum terprogram secara sistematis dan berkelanjutan.

Akibatnya, hasil yang diperoleh warga binaan tidak maksimal dan kualitas output yang

dihasilkan tidak mampu bersaing dengan produk sejenis di luar lapas. Menurut teori Dunn (2018), kualitas output merupakan ukuran seberapa bermanfaat hasil program bagi penerima manfaat, namun dalam praktiknya keterbatasan sarana membuat hasil pembinaan hanya bernilai konsumsi internal. Penelitian Prasetyo (2021) juga mengungkapkan bahwa tanpa dukungan modal dan sarana memadai, produk keterampilan binaan sulit berkembang menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan.

Selain keterbatasan fasilitas, lemahnya akses pasar bagi hasil karya warga binaan juga menjadi kendala besar. Produk-produk keterampilan seperti kerajinan tangan, hasil pertanian, hingga karya kreatif warga binaan sering menumpuk tanpa adanya mekanisme pemasaran yang jelas. Hal ini menurunkan kesesuaian program dengan kebutuhan warga binaan, karena tujuan pembinaan kemandirian bukan hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menyiapkan mereka agar mampu berdaya saing setelah bebas. Penelitian Handayani (2019) menemukan bahwa lemahnya jejaring pemasaran membuat produk hasil pembinaan kehilangan nilai ekonomis, sehingga warga binaan tidak memiliki pengalaman nyata dalam mengelola hasil kerja mereka sebagai sumber penghidupan.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta kondisi overkapasitas lapas. Dengan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, hanya sebagian kecil yang dapat mengikuti program keterampilan secara rutin, sementara lainnya tidak mendapat kesempatan yang sama. Situasi ini menurunkan efektivitas dan produktivitas, karena tujuan program tidak tercapai secara merata di seluruh populasi binaan. Dunn (2018) menekankan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan program berhasil dicapai, namun overcrowding justru mempersempit jangkauan pembinaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2020) yang menegaskan bahwa kepadatan berlebih di lapas menjadi salah satu faktor utama rendahnya kualitas pembinaan di Indonesia. Program kemandirian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati masih belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja

modern. Sebagian besar kegiatan masih berfokus pada keterampilan konvensional, seperti pertukangan atau kerajinan manual, sementara aspek digitalisasi, wirausaha online, dan teknologi modern belum banyak disentuh. Akibatnya, meskipun warga binaan memperoleh keterampilan, output yang dihasilkan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan dunia kerja kontemporer. Hal ini menunjukkan rendahnya kesesuaian program dengan kebutuhan aktual, sebagaimana ditegaskan Dunn (2018), yang menekankan bahwa kebijakan atau program harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

Keterbatasan dalam sistem pemasaran juga membuat keberhasilan program kemandirian menjadi terhambat. Produk-produk hasil karya warga binaan umumnya hanya dapat dipasarkan melalui kegiatan bersifat temporer atau musiman, yang diselenggarakan oleh pihak Lapas bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah atau lembaga sosial. Kegiatan tersebut biasanya berupa pameran hasil pembinaan warga binaan, bazaar produk UMKM binaan, atau event peringatan hari besar nasional, seperti Hari Bhakti Pemasyarakatan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

Misalnya, pada momen Hari Bhakti Pemasyarakatan yang rutin diperingati setiap bulan April, Lapas Kelas IIB Tanjung Pati sering membuka stand pameran mini di area lapas atau di kantor pemerintah daerah, untuk menampilkan hasil karya warga binaan seperti produk pertanian (sayuran dan tanaman hias), kerajinan tangan dari bahan bekas, anyaman, serta karya seni lukis. Namun, kegiatan semacam ini hanya berlangsung 1–2 hari dan tidak diikuti dengan pemasaran lanjutan.

Selain itu, terdapat pula bazaar bersama UMKM lokal yang diadakan pada waktu tertentu, seperti menjelang bulan Ramadhan atau akhir tahun, di mana hasil karya warga binaan dijual bersamaan dengan produk masyarakat umum. Akan tetapi, keterlibatan Lapas dalam kegiatan tersebut masih bersifat undangan insidental, tergantung pada inisiatif instansi penyelenggara, sehingga kontinuitas pemasaran produk tidak dapat terjaga.

Kegiatan lain yang bersifat musiman juga termasuk pameran kerajinan antar-lapas yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat. Dalam kegiatan ini, setiap lapas menampilkan hasil karya unggulannya. Namun, karena pelaksanaannya hanya dilakukan setahun sekali, maka dampaknya terhadap peningkatan pendapatan maupun motivasi kewirausahaan warga binaan masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola pemasaran hasil karya warga binaan di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati belum berorientasi pada keberlanjutan ekonomi (*sustainability*). Pola ini belum didukung oleh sistem distribusi tetap, jaringan mitra usaha, atau platform digital yang dapat memasarkan produk secara lebih luas dan *kontinu*. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas dan produktivitas program pembinaan kemandirian, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2018), karena output program belum memberi dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian ekonomi warga binaan setelah bebas.

Kondisi ini menurunkan efisiensi dan produktivitas, karena tenaga, waktu, serta biaya yang sudah dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding. Dalam perspektif Dunn, hal ini menunjukkan bahwa *output* yang dihasilkan gagal berkembang menjadi *outcome* yang nyata. Situasi ini juga menandakan rendahnya kualitas pembinaan, sebab warga binaan tidak mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kendala pelaksanaan program pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati menunjukkan bahwa program telah berjalan dalam dua dimensi utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, namun masih menghadapi sejumlah kendala struktural maupun teknis. Pada aspek pembinaan kepribadian, keterbatasan sarana ibadah, minimnya tenaga pembina profesional, fluktuasi motivasi warga

binaan, keterbatasan anggaran, kondisi overkapasitas, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor dominan yang menghambat kelancaran kegiatan. Dampaknya, tujuan utama pembinaan berupa peningkatan kesadaran religius, moral, serta transformasi perilaku belum sepenuhnya tercapai secara merata pada seluruh warga binaan. Di sisi lain, pada aspek pembinaan kemandirian, minimnya fasilitas pelatihan, terbatasnya akses pemasaran hasil karya, ketidaksesuaian keterampilan dengan tuntutan pasar modern, serta ketergantungan pada event musiman menyebabkan hasil program tidak memiliki keberlanjutan nilai ekonomi. Kondisi ini membuat tujuan kemandirian, yakni membekali warga binaan agar mampu berdaya saing setelah bebas, belum tercapai secara optimal.

Jika dianalisis dengan menggunakan kerangka teori Dunn (2018), terlihat bahwa efektivitas dan produktivitas program pembinaan di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati relatif menunjukkan hasil positif, ditandai dengan adanya perubahan perilaku warga binaan, peningkatan kesadaran spiritual, serta lahirnya berbagai produk keterampilan yang bermanfaat. Namun demikian, indikator lain seperti efisiensi, kualitas output, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masih menemui kendala signifikan. Efisiensi program terhambat karena keterbatasan anggaran dan minimnya tenaga pembina profesional yang berakibat pada ketidakseimbangan antara input dan output. Kualitas output masih bervariasi karena keterbatasan fasilitas dan bahan praktik, sementara kesesuaian program dengan kebutuhan belum maksimal karena pembinaan belum sepenuhnya berbasis asesmen individual dan tidak sepenuhnya relevan dengan pasar kerja modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembinaan telah memberikan kontribusi positif, keberlangsungannya masih menghadapi kendala mendasar yang membutuhkan perbaikan secara sistematis.

REFERENSI

- Abdul Mukhyi, M. (2023). Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif. In PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Arifa, R. N. (2024). Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 44–60.
- Bachtiar, moch agung. (2020). Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Magelang. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 7(1), 103–115.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis*. routledge.
- Hartono, J. (2018). Metodologi Penelitian.
- Handayani, T., HS, S., & PRIYATNO, P. D. (2019). Strategi Marketing Koperasi Syariah. Penerbit Insania.
- Heliany, I., & Manurung, E. H. (2019). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1–7.
- Lestari, D. F. Pengaruh Harga Diri Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Kota Semarang Skripsi.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press.
- Pakpahan, S. F. G., & Habibie, D. K. (2025). Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 3858–3867.
- Prasetyo, D. A. Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pendampingan Bank Indonesia Sambal Mbok Arum Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- S. Sugiono, P. Lestari. (2021). buku metode penelitian komunikasi. In *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 3, p. 35).
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga

- Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38.
- Situmorang, M. W. Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. *IndraTech*, 2(1), 51-61.
- Wulandari, D. C. (2020). Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Penderita HIV dan AIDS (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).